



BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tanggal 23 Agustus 2016 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

q

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL  
dan  
BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf g dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2015 Nomor 57) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Calon kepala Desa adalah Penduduk Desa yang mempunyai Persyaratan:
  - a. warga Negara Republik Indonesia ;
  - b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha esa ;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila sebagai dasar Negara, melaksanakan undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhenika Tunggal ika yang dibuktikan dengan pernyataan bermaterai cukup;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan izasah atau surat tanda tamat belajar dari lembaga berwenang dan telah dilegalisir ;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun saat mendaftar yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir dari lembaga yang berwenang ;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai ;

- g. dihapus;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara ;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima ) tahun setelah menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
  - j. tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup ;
  - k. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit umum Buol;
- (2) bagi penduduk desa setempat yang melaksanakan tugas sebagai pejabat kepala desa karena jabatan kepala desa telah berakhir atau kepala desa telah diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati tidak dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa ;
- (3) penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa dilakukan jangka waktu 7 ( Tujuh) hari

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	y.
STAF AHLI BUPATI BID. HUKUM & POLITIK.	zv

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal, 23 Agustus 2017

BUPATI BUOL,   
  
y. AMIRUDDIN RAUF

Diundangkan di Buol  
pada tanggal, 23 Agustus 2017  
SEKRETARIS DAERAH,

  
y. ABD. HAMID LAKUNTU